

ABSTRAK

TINJAUAN PENGATURAN KEGIATAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI JASA PENGIRIMAN BERBASIS APLIKASI ONLINE DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK DALAM HAL TERJADINYA PENGIRIMAN BARANG YANG DILARANG UNTUK DIMILIKI ATAU DIEDARKAN

Jerry Agustian

(1487022)

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi atas teritorial darat dan laut yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang tergolong tinggi. Kebutuhan masyarakat Indonesia juga tergolong tinggi. Seiring perkembangan teknologi telah muncul suatu bidang usaha baru yaitu kegiatan pengiriman barang berbasis aplikasi *online* (layanan kurir instan dari Go-jek dan Grab). Jasa pengiriman barang berbasis aplikasi *online* ini disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengirim barang yang dilarang untuk dimiliki atau diedarkan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pengiriman barang melalui jasa pengiriman berbasis aplikasi *online* menurut peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan bagaimana pertanggung jawaban pidana para pihak dalam hal terjadinya penyalahgunaan jasa pengiriman berbasis aplikasi *online* dengan mengirim barang yang dilarang untuk dimiliki dan diedarkan menurut Perundang-Undangan di Indonesia.

Metode penelitian bersifat yuridis normatif yang akan menggali dari berbagai literature sekunder, terdiri dari perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan kegiatan pengiriman barang berbasis aplikasi *online*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan pengembang aplikasi tidak tunduk pada undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang Pos karena mereka hanyalah perusahaan aplikasi yang menyediakan sarana pengiriman barang melalui aplikasinya. Pihak penyedia layanan (*driver*) adalah pihak yang menyelenggarakan pengiriman barang tersebut tidak dapat tunduk juga pada aturan Pos karena aturan Pos hanya mengatur kegiatan pengiriman barang yang dilakukan oleh badan usaha saja bukan perorangan seperti pengiriman barang berbasis aplikasi *online*.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah di Indonesia masih terjadi kekosongan hukum terkait kegiatan pengiriman barang berbasis aplikasi *online*. Para pihak hanya tunduk pada hukum privat saja sedangkan hukum publiknya tidak. Undang-undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos tidak dapat secara penuh diterapkan terkait kegiatan pengiriman barang berbasis aplikasi *online* karena pihak yang menyelenggarakan pengiriman barang berbasis aplikasi *online* berbentuk perorangan, sedangkan yang tunduk pada aturan Pos hanyalah penyelenggara pengiriman barang yang berbentuk badan usaha saja. Prinsip-prinsip kegiatan pengiriman barang terkait wajib melakukan pengecekan barang yang akan dikirim yang diatur oleh undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang Pos harusnya dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya pengiriman barang yang dilarang untuk dimiliki atau diedarkan.

Kata Kunci : Pengiriman, Barang Ilegal, *Online*, Pertanggungjawaban.

ABSTRACT

THE ARRANGEMENT REVIEW OF SHIPPING ACTIVITIES THROUGH APPLICATION BASED ONLINE DELIVERY SERVICE AND THE CRIMINAL LIABILITY OF THE PARTIES IN THE EVENT OF THE ACCURRENCE OF THE PROHIBITED GOODS FOR SHIPPING OWNED OR RELEASED

Jerry Agustian
(1487022)

Indonesia is an archipelagic country which is divided into a wide area of land and sea with a relatively high population. The needs of Indonesian people are also high. As the development of technology has emerged a new business field, namely application-based online shipping activities (instant courier services from Go-jek and Grab). This online application based freight forwarding service is misused by parties who are not responsible for sending items that are prohibited to be owned or circulated. The problem identification in this research is how to regulate the delivery of goods through online application-based shipping services according to Indonesian legislation and how the criminal liability of the parties in the event of misuse of online application-based shipping services by sending goods that are prohibited to be owned and circulated according to the Law in Indonesia.

The research method is Juridical Normative which will explore from various secondary literature, consisting of legislation, regulations, books, and journals relating to online application-based goods delivery activities. The results of the research show that the application developer companies are not included to the law number 38 year 2009 concerning of Post because they are only an application company that provides a means of shipping goods through it's application. The service provider (driver) is the party that organizes the delivery of goods also can not submit to the rules of the Post because the Post rules only regulate the delivery of goods carried out by business entities only, not individuals such as online application-based goods delivery.

The conclusion in this research is that in Indonesia there is still a legal vacuum related to online application-based goods delivery activities. The parties are only subject to private law while the public law is not. Law Number 38 Year 2009 concerning of Post cannot be fully implemented related to online application-based goods delivery activities because the party that organizes online application-based goods delivery is in the form of individuals, whereas those subject to Postal rules are only providers of goods in the form of business entities. The principles of the delivery of related goods are obliged to check the goods to be sent which are regulated by law number 38 Year 2009 concerning of Post, which should be applied to prevent the shipment of goods which are prohibited to be owned or circulated.

Keywords: Deliver, Illegal Items, Online, Liability.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TERJADINYA	
 PENGIRIMAN BARANG YANG DILARANG UNTUK	
 DIMILIKI ATAU DIEDARKAN MELALUI JASA	
 PENGIRIMAN BERBASIS APLIKASI <i>ONLINE</i>	
 A. Tinjauan Umum Hukum Pidana Indonesia	

1. Pengertian Hukum Pidana	26
2. Sifat Hukum Pidana.....	28
3. Fungsi Hukum Pidana	31
4. Tujuan Hukum Pidana.....	33
5. Asas-asas Yang Terdapat Dalam Hukum Pidana	38
6. Sumber Hukum Pidana.....	41
B. Pertanggungjawaban Pidana Atas Terjadinya Pelanggaran Hukum Pidana	
1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	44
2. Mampu Bertanggungjawab.....	49
3. Kesengajaan, <i>Dolus Malus</i> , <i>Dolus Eventualis</i>	51
4. Kealpaan, <i>Bewuste Culpa</i> , <i>Onbewuste Culpa</i>	54
5. Alasan Pemaaf.....	56
6. Keturutsertaan/ <i>deelneming</i>	57
C. Aspek Pengaturan Hukum Atas Barang yang Dilarang Untuk Dimiliki atau Diedarkan	60

BAB III TINJAUAN PENGATURAN PENGIRIMAN BARANG DI INDONESIA

A. Regulasi Kegiatan Pengiriman Barang di Indonesia

1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang.....80
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.....81
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 69

Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan

Barang di Jalan.....86

B. Aspek Hukum Perikatan Dalam Kegiatan Pengiriman

Barang

1. Hukum Perikatan.....89
2. Perikatan dalam kegiatan pengiriman barang95
3. Hak dan kewajiban masing-masing pihak97

C. Perkembangan kegiatan pengiriman barang berbasis aplikasi online di Indonesia100

D. Uraian Hasil Wawancara106

BAB IV TINJAUAN PENGATURAN KEGIATAN PENGIRIMAN BARANG BERBASIS APLIKASI ONLINE DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PARA PIHAK DALAM HAL TERJADINYA PENGIRIMAN BARANG YANG DILARANG UNTUK DIMILIKI ATAU DIEDARKAN

A. Tinjauan Pengaturan Kegiatan Pengiriman Barang Berbasis Aplikasi Online.....109

B. Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak dalam hal Terjadinya Pengiriman Barang yang Dilarang Untuk Dimiliki atau Diedarkan122

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	158
B. Saran	159
DAFTAR PUSTAKA.....	161

